

Pengaruh Management Control System, Pengawasan Inspektorat Dan Kompetensi Individu Terhadap Akuntabilitas OPD

Wahyu Suriyasti¹, Muhammad Su'un², Mursalim³

Universitas Muslim Indonesia

Email: asty507@gmail.com

(Diterima: 30 Juli 2020; direvisi: 5 Agustus 2020; dipublikasikan: 1 Oktober 2020)



©2020 –Bongaya Journal for Research in Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

Abstract: *The research of this study is: (1) To understand and analyze the management control system that has a significant impact on the OPD accountability system of the Makassar City Inspection Bureau. (2) To understand and analyzing the supervision of the inspector has a significant impact on the OPD accountability system of the Makassar City Inspector's Office. (3) To understand and analyzing personal abilities has a significant impact on the OPD accountability system of the Makassar City Supervision Bureau. The data used is raw data. Use questionnaires to collect data in this study. The questionnaire has been distributed to 39 officials of the Makassar City Inspection Bureau. Use multiple regression analysis for data analysis with the help of SPSS 23.00. The results of this study show that the management control system, the supervision of the inspector and the personal ability have a positive and significant impact on the OPD accountability system of the Makassar City Inspector's Office.*

Keywords: *Management Control System, Inspectorate Supervision, Individual Competence, Accountability.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan : (1) Mengetahui dan menganalisis *management control system* berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas OPD pada kantor Inspektorat Kota Makassar. (2) Mengetahui dan menganalisis pengawasan Inspektorat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas OPD pada kantor Inspektorat Kota Makassar. (3) Mengetahui dan menganalisis kompetensi individu berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas OPD pada kantor Inspektorat Kota Makassar. Data yang digunakan adalah data primer. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada 39 aparatur pada Inspektorat Kota Makassar. Data analisis dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 23.00. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Management control system*, pengawasan Inspektorat dan kompetensi individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas OPD pada kantor Inspektorat Kota Makassar.

Kata kunci: *Management Control System, Pengawasan Inspektorat, Kompetensi Individu, Akuntabilitas.*

PENDAHULUAN

Tuntutan masyarakat atas pertanggungjawaban pemerintah dan pemberian informasi kepada publik saat ini semakin meningkat. Untuk itulah, salah satu elemen yang penting yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah adanya akuntabilitas publik, disamping

transparansi, tegaknya hukum dan peraturan (Sholehah *et al.*, 2018).

Mardiasmo (2010) menjelaskan pengertian akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat)

yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Berdasarkan hasil penilaian akuntabilitas kinerja Pemerintah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar pada tahun 2016 masuk dalam kategori CC atau setara dengan nilai 50. Kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan masuk dalam kategori BB dengan nilai 64,50 dan pada tahun 2018 masih mempertahankan pada kategori BB dengan nilai 67,92 naik dari nilai tahun lalu. Namun, menurut Kepala Inspektorat Kota Makassar masih dibutuhkan sinergitas yang baik antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam meningkatkan nilai SAKIP kedepannya. Masih terdapat proses administrasi yang masih lemah yang perlu diperhatikan yaitu dokumen perencanaan OPD masing-masing karena nilai SAKIP OPD akan menentukan tingkat nilai SAKIP Kota secara keseluruhan. (<https://www.inspektorat.makassarkota.go.id>, 31 Juli 2019).

Oleh karena itu, diperlukan pengendalian oleh Pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas publik sehingga target kerja dapat terealisasi pada organisasi sektor publik. Pengendalian manajerial dalam organisasi sektor publik dapat membantu mempercepat pencapaian hasil yang tepat dimana hal tersebut diinginkan oleh Pemerintah. *Management Control System* atau sistem pengendalian manajemen dalam organisasi sektor publik merupakan rancangan sistem untuk memengaruhi pihak-pihak yang terkait pada organisasi agar selaras dengan tujuan organisasi. Beberapa aktivitas yang perlu diterapkan dalam pengendalian manajerial sektor publik, diantaranya perencanaan, sistem pengendalian dan penilaian serta pelaporan kinerja (Mardiasmo, 2010).

Untuk memfasilitasi tercapainya akuntabilitas publik dalam tatanan pelaksanaan fungsi yang dilaksanakan oleh Inspektorat daerah dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan memahami bidang Akuntansi Pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Kompetensi individu adalah kemampuan individu dalam hal ini Aparatur Pengawasan

Intern Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai.

Penelitian terkait akuntabilitas telah dilakukan oleh beberapa peneliti di Indonesia diantaranya telah dilakukan oleh Santoso (2016) hasil penelitian menemukan bahwa Sistem Pengendalian Intern, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Kemudian Umaira dan Adnan (2019) yang meneliti tentang Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi SDM dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, kompetensi SDM dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini merujuk dari penelitian yang telah dilakukan oleh Rininda dan Sudaryati (2020) yang menggunakan variabel ketepatan anggaran, sistem pengendalian manajemen sektor publik dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas. Namun, berbeda dengan penelitian tersebut, pada penelitian ini, peneliti menggunakan variabel bebas yaitu *management control system*, pengawasan Inspektorat dan kompetensi individu.

Tujuan Penelitian yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis *management control system*, pengawasan inspektorat dan kompetensi individu berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas OPD pada kantor Inspektorat Kota Makassar.

Tinjauan Pustaka

Teori Keagenan

Kaitan teori keagenan dalam penelitian ini adalah menjelaskan tentang pelaporan pertanggungjawaban OPD. Dalam hal ini pemerintah daerah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipal, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Pengendalian manajerial dalam organisasi sektor publik dapat

membantu mempercepat pencapaian hasil yang tepat dimana hal tersebut diinginkan oleh pemerintah. Dalam hubungan keagenan, pemerintah sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipal.

Teori keagenan beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymetry* antara pihak agent (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak principal (masyarakat). Adanya *information asymetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi. Oleh karena itu, pengawasan Inspektorat pada OPD sebagai mekanisme *cheks and balances* agar dapat mengurangi *information asymetry*. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut pengawasan, dibutuhkan kompetensi SDM yang memiliki keahlian untuk melakukan pengawasan bahwa pengelolaan pemerintah daerah atau OPD dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pengaruh *Management control system* terhadap akuntabilitas

Management control system dalam sektor publik merupakan rancangan sistem untuk memengaruhi pihak-pihak yang terkait pada organisasi agar selaras dengan tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan organisasi khususnya sektor publik, membutuhkan penerapan strategi yang efektif dan efisien, dimana hal tersebut dapat dilakukan oleh sistem pengendalian manajemen (Mardiasmo, 2010).

Teori keagenan dalam penelitian ini dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya. *Management control system* pada OPD dapat membantu mempercepat pencapaian hasil yang tepat sesuai dengan tujuan organisasi. Jika sistem dari pengendalian manajerialnya baik tentunya dapat meningkatkan akuntabilitas pada OPD.

Hasil penelitian Paramitha dan Gayatri (2016) menyatakan akuntabilitas kinerja SKPD dipengaruhi oleh sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem dan komunikasi yang benar tentunya akan meningkatkan akuntabilitas kinerja di institusi pemerintahan daerah. Hasil penelitian Rininda dan Sudaryati (2020) juga menemukan bahwa Sistem

pengendalian manajemen sektor publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian di atas serta kesimpulan dari landasan teori yang ada, maka dapat ditetapkan hipotesis sebagai berikut :

H1: *Management control system* berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas OPD pada Inspektorat Kota Makassar.

Pengaruh pengawasan Inspektorat terhadap akuntabilitas

Inspektorat memiliki peran penting sebagai pengawas fungsional intern pemerintah. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau aparat dan memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan, pengujian, penilaian, monitoring dan evaluasi. Jadi, dengan adanya pengawasan fungsional oleh Inspektorat kota/daerah dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas publik yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Teori keagenan beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymetry* antara pihak agent (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak principal (masyarakat). Adanya *information asymetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi. Oleh karena itu, pengawasan Inspektorat pada OPD sebagai mekanisme *cheks and balances* agar dapat mengurangi *information asymetry*.

Penelitian mengenai hubungan pengawasan Inspektorat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan oleh Puspitasari, Purnawati dan Atmadja (2016) yang menunjukkan bahwa pengawasan intern berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas serta kesimpulan dari landasan teori yang ada, maka dapat ditetapkan hipotesis sebagai berikut :

H2: Pengawasan Inspektorat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas OPD pada Inspektorat Kota Makassar.

Pengaruh kompetensi individu terhadap akuntabilitas

Bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik melalui laporan keuangan pemerintah dibutuhkan tenaga-tenaga akuntansi terampil pada pemerintah daerah, hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis akuntansi bagi pegawai pemerintah daerah

yang ditugaskan sebagai pengelola keuangan atau melalui rekrutmen pegawai baru yang memiliki kemampuan akuntansi keuangan daerah. Tidak hanya tenaga-tenaga akuntansi terampil tersebut, juga dibutuhkan adanya sistem dan prosedur pembukuan yang memadai dan kebijakan akuntansi sebagai pedoman pegawai dalam mengelola keuangan daerah.

Teori keagenan dalam penelitian ini juga dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya berupa membuat pertanggungjawaban keuangan dengan tepat. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut dibutuhkan kompetensi SDM yang memiliki keahlian untuk dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian Pramudiarta (2015) menyebutkan bahwa sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan dalam menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia yang kompeten akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Sejalan dengan hasil penelitian Pramudiarta (2015), Santoso (2016) juga menemukan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas akuntansi keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas serta kesimpulan dari landasan teori yang ada, maka dapat ditetapkan hipotesis sebagai berikut :

H3: Kompetensi individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas OPD pada Inspektorat Kota Makassar.

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam ranah penelitian kuantitatif karena akan menguji hubungan dan pengaruh antara variabel independen dan dependen (Ghozali, 2009).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh APIP Inspektorat Kota Makassar yang ikut dalam tugas pemeriksaan yaitu 35 orang auditor dan 4 orang staf keuangan. Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan menggunakan metode sampel jenuh merupakan teknik pengumpulan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 39 orang.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang didistribusikan secara langsung pada Inspektorat Kota Makassar. Selanjutnya jawaban dari setiap instrument yang berhasil dikumpulkan melalui proses tabulasi menggunakan skala *likert*.

Definisi Operasional Variabel

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Defenisi Variabel	Indikator
Akuntabilitas (Y)	Akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik.	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas hukum • Akuntabilitas manajerial • Akuntabilitas program • Akuntabilitas kebijakan • Akuntabilitas financial (Mahmudi, 2013)
Management Control Sistem (X ₁)	Strategi yang digunakan oleh OPD untuk mencapai tujuannya.	<ul style="list-style-type: none"> • Keterandalan dan integritas informasi • Kepatuhan pada kebijakan dan peraturan • Pencapaian kegiatan ekonomis dan efisien • Melindungi asset organisasi (Anthony dan Govindarajan, 2015)
Pengawasan individu (X ₂)	Suatu aktivitas pihak independen yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, Kabupaten/Kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pengawasan • Pengkajian • Pengusutan • Penilaian (PP No. 20 Tahun 2001 Pasal 1)

Kompetensi individu (X3)	Kompetensi individu merupakan Kemampuan individu suatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan • Keterampilan/keahlian • Sikap (Pramudita, 2015)
--------------------------	--	---

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa tahap analisis data akan dilakukan dan dijelaskan tujuannya yaitu; 1) uji validitas untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner yang telah disebar kepada seluruh responden. 2) uji reliabilitas untuk menguji konsistensi data dan mengukur sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. 3) uji normalitas dilakukan untuk melihat model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak melalui grafik Normal Probability Plot. 4) uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model. 5) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu observasi ke observasi lain (Ghozali, 2009). Untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini maka dilakukan analisis linier berganda melalui alat analisis program SPSS. Model Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots (1)$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas

β_0 = Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien Regresi

X1 = Management Control System

X2 = Pengawasan Inspektorat

X3 = Kompetensi individu

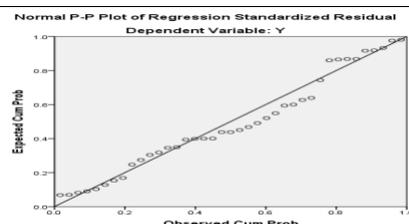
e = Error (Kesalahan Residual)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil Uji Normalitas

Dalam penelitian ini untuk menguji normalitas maka digunakan grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* untuk melihat model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) apakah mempunyai kontribusi atau tidak.



Gambar 1 Hasil Uji Normalitas

Grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* sebagaimana tersaji pada gambar 1 terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinieritas

Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel independennya, maka hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya menjadi terganggu. Untuk menguji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai VIF (Variance Inflation Faktor). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas (Sunjoyo, dkk, 2013). Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 2:

Tabel 2. Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	Collineary Statistics	
	Tolerance	VIF
Management Control System (X1)	0.324	3.086
Pengawasan inspektorat (X2)	0.370	2.704
Kompetensi individu (X3)	0,654	1.529

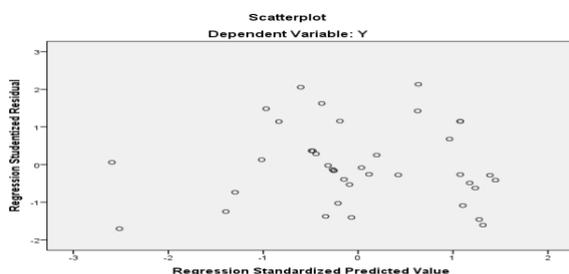
Sumber: Output SPSS, 2020

Dari hasil pengujian multikolinieritas data di atas dapat diketahui nilai *Varians Inflating Factors* (VIF) ketiga variabel bebas yaitu: *Management Control System* sebesar 3,086, pengawasan inspektorat sebesar 2,704 dan kompetensi SDM sebesar 1.529, dimana ketiga variabel tersebut mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai toleransinya lebih besar dari 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa indikasi keberadaan multikolinieritas pada persamaan yang dilakukan atau hubungan yang terjadi antar

variabel dapat ditoleransi sehingga tidak akan mengganggu hasil regresi.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Deteksi heteroskedastisitas dilakukan dengan metode *scatterplot* dengan melihat penyebaran titik-titik yang ditimbulkan terbentuk secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu serta arah penyebarannya berada di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas

Grafik *scatterplot* yang ditampilkan pada gambar 2 menunjukkan bahwa data tersebar pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola yang jelas dalam penyebaran data tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.

Hasil Uji Hipotesis

Uji R2 (Koefisien Determinasi)

Uji koefisien determinasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Berikut disajikan hasil uji koefisien determinasi pada tampilan tabel 4 dibawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji R²

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.915 ^a	.837	.823	.24018

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer Diolah SPSS V.23 (2020)

Berdasarkan output tabel di atas diperoleh nilai R sebesar 0,915 atau 91,50%,

nilai ini menunjukkan bahwa *management control system*, pengawasan inspektorat, kompetensi individu berpengaruh terhadap akuntabilitas pada Inspektorat Kota Makassar. Sedangkan nilai koefisien determinasi R² (R square) yang diperoleh adalah 0,837 atau 83,70%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 83,70% akuntabilitas pada Inspektorat Kota Makassar. Hal ini berarti bahwa 16,30% akuntabilitas pada Inspektorat Kota Makassar dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji ini menggunakan α 5%. Dengan ketentuan, jika signifikansi dari F hitung < dari 0,05 maka hipotesis yang diajukan dapat diterima. Hasil pengujiannya ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10.334	3	3.445	59.711	.000 ^b
	Residual	2.019	35	.058		
	Total	12.353	38			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber: Data Primer Diolah SPSS V.23 (2020)

Sesuai hasil analisis regresi ANOVA (*Analysis of Variant*) dapat dilihat F-hitung = 59,711 sedangkan F-tabel .2,870 yaitu (df1 = 3; df2 = 35; α = 0,05) atau pada taraf nyata 5%. Tampak bahwa F-hitung > F-tabel = 59,711 > 2,870, maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa *Management control system*, pengawasan inspektorat dan kompetensi individu secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pada Inspektorat Kota Makassar.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Pada penelitian ini, uji t digunakan untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau tidak dengan mengetahui apakah variabel independen secara individual memengaruhi variabel dependen.

Hasil pengujian uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini :

Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Coefficients ^a			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.855	.386		2.219	.033
1 X1	.514	.142	.436	3.630	.001
X2	.396	.126	.352	3.131	.004
X3	.305	.103	.251	2.975	.005

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS, 2020

$$\text{Akuntabilitas} = -0,855 + 0,514 X_1 + 0,396 X_2 + 0,305 X_3 + e$$

Berdasarkan hasil persamaan tersebut di atas yang diperoleh angka Beta atau *standardized coefficient* dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Nilai konstanta (β_0) sebesar -0,855, artinya apabila *Management control system*, pengawasan inspektorat dan kompetensi individu sama dengan 0, maka akuntabilitas pada Inspektorat Kota Makassar sebesar -0,855.
- Nilai regresi (β_1) variabel *Management control system* (X_1) sebesar 0,514 menunjukkan bahwa jika *Management control system* naik 1% maka akan meningkatkan akuntabilitas pada Inspektorat Kota Makassar sebesar 51,40% dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.
- Nilai regresi (β_2) variabel pengawasan Inspektorat (X_2) sebesar 0,396 menunjukkan bahwa jika pengawasan Inspektorat naik 1% maka akan meningkatkan akuntabilitas pada Inspektorat Kota Makassar sebesar 39,60% dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.
- Nilai regresi (β_3) variabel kompetensi individu (X_3) sebesar 0,305 menunjukkan bahwa jika kompetensi individu naik 1% maka akan meningkatkan akuntabilitas pada Inspektorat Kota Makassar sebesar 30,50%

dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.

Pembahasan

- Pengaruh *Management Control System* (X_1) terhadap akuntabilitas OPD pada Inspektorat Kota Makassar (Y)

Hasil penelitian ini yang membuktikan bahwa *Management Control System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas OPD pada Inspektorat Kota Makassar, ini memberikan arti dengan adanya *Management Control System* yang baik akan meningkatkan akuntabilitas OPD pada Inspektorat Kota Makassar.

Dengan adanya *Management Control System*, berbagai ragam aktivitas dapat terkoordinir dan terarah menuju tujuan yang telah ditetapkan oleh OPD dengan penerapan strategi yang efektif dan efisien yang tentunya dapat meningkatkan akuntabilitas. Dewi dan Supadami (2015) menyatakan dalam pengendalian manajerial aspek komunikasi sifatnya krusial dalam organisasi, baik itu komunikasi bawahan maupun atasan. Sistem dan komunikasi yang baik tentunya akan meningkatkan akuntabilitas kinerja oleh OPD.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Paramitha dan Gayatri (2016) menyatakan akuntabilitas kinerja SKPD dipengaruhi oleh sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem dan komunikasi yang benar tentunya akan meningkatkan akuntabilitas kinerja di institusi pemerintahan daerah. Hasil penelitian Rininda dan Sudaryati (2020) juga menemukan bahwa Sistem pengendalian manajemen sektor publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas.

- Pengaruh pengawasan Inspektorat (X_2) terhadap akuntabilitas OPD pada Inspektorat Kota Makassar (Y).

Hasil penelitian ini yang membuktikan bahwa pengawasan Inspektorat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas OPD pada Inspektorat Kota Makassar, ini memberikan

arti dengan adanya pengawasan Inspektorat yang baik akan meningkatkan akuntabilitas OPD pada Inspektorat Kota Makassar.

Pengawasan Inspektorat berfungsi untuk mereview laporan keuangan pemerintah daerah juga untuk membantu instansi menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. (Yosa, 2010).

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Puspitasari, Purnawati dan Atmadja (2016) yang menunjukkan bahwa pengawasan intern berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil ini juga mendukung hasil penelitian Hamzah, Mattulada dan Ikbal (2018) yang menemukan bahwa pengawasan intern berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Pengaruh Kompetensi Individu (X_3) terhadap akuntabilitas OPD pada Inspektorat Kota Makassar (Y).

Hasil penelitian ini yang membuktikan bahwa Kompetensi individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas OPD pada Inspektorat Kota Makassar, ini memberikan arti dengan adanya pengawasan Inspektorat yang baik akan meningkatkan akuntabilitas OPD pada Inspektorat Kota Makassar.

Bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik melalui laporan keuangan pemerintah dibutuhkan tenaga-tenaga akuntansi terampil pada pemerintah daerah, hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis akuntansi bagi pegawai pemerintah daerah yang ditugaskan sebagai pengelola keuangan atau melalui rekrutmen pegawai baru yang memiliki kemampuan akuntansi keuangan daerah. Tidak hanya tenaga-tenaga akuntansi terampil tersebut, juga dibutuhkan adanya sistem dan prosedur pembukuan yang memadai dan kebijakan

akuntansi sebagai pedoman pegawai dalam mengelola keuangan daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa *Management Control System*, pengawasan Inspektorat, kompetensi individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas OPD pada Inspektorat Kota Makassar. Penelitian ini menyarankan perlu ditingkatkan kompetensi individu dengan memberdayakan secara maksimal indikator-indikator yang membentuk kompetensi individu tersebut agar akuntabilitas OPD pada Inspektorat Kota Makassar dapat ditingkatkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Bella Puspita Rininda dan Erina Sudaryati. (2020). *Pengaruh Ketepatan Anggaran, Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas*. E-Jurnal Akuntansi Vol. 30 No. 5 Mei, hal 1090-1113.
- Delano dan Devi. (2013). *Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI dan Pengawasan Keuangan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal.WRA, Vol. 1, No. 1 April 2013
- Egrinaen Mauliziska dan Nugraheni Putri. (2015). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntansi Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. JOM Fekon Vol. 2 No.2 Oktober.
- Eli Budi Santoso. (2016). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi SDN Terhadap Akuntabilitas keuangan Daerah*. Tesis. Pascasarjana Ilmu Akuntansi Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Imam Ghozali. (2015). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Semarang : Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Kuncoro, Mudrajad. (2011). *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi, Edisi Keempat*. Yogyakarta : Penerbit UPP STIM YKPM.
- Mardiasmo. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Mualifu, Ahmad Gusful dan Hermawan. (2019). *Pengaruh Transparansi, Kompetensi Sistem Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa di Kec. Mrebet Kabupaten Purbalingga)*. Journal Of Economic, Business and Engineering. Vol. 1 No.1 Oktober.
- Ni Made Dewi Puspitasari, I Gusti Ayu Purnawati, Anantawikrama Tungga Atmadja. (2016). *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah, Pengawasan Intern, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Profesionalitas Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah dengan Aksebilitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Buleleng)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi UNDIKSHA Vol. 5 No. 2.
- Nirmalasari Hamzah, Andi Mattulada dan Moh. Ikkal B. (2018). *Pengaruh Hasil Pengawasan Internal dan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Terhadap Kinerja Keuangan SKPD di Kabupaten Tojo Una-una*. Jurnal Katalogis, Vol.6 No. 2, Februari, Hal 41-52.
- Sidharta Eka Ananta. (2013). *Perubahan Perencanaan Strategis dan Dampaknya Terhadap Praktik Sistem Pengendalian Manajemen*. Jurnal Ilmiah ESAI Vol.7 No. 3 Juli.
- Sekaran, Uma. (2011). *Research Methods For Business*, Edisi 4 buku 2, Terjemahan Yon, Kwan, Jakarta : Salemba Empat.
- Sholehah, N. L. H., Rahim, S., & Muslim, M. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu dan Personal Culture Terhadap Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada OPD Provinsi Gorontalo). ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 1(1), 40-54.
- Sugiyono. (2016). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang telah diperbaharui Keputusan Kepala LAN dengan Nomor :239/IX/6/8/203 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Rizal Pramudiarta, Agung Juliarto. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi pemerintah daerah (Studi Persepsi Pegawai SKPD di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal). Diponegoro *Journal Of Accounting*, Vol 4 No. 3 (hal 1-14). Univrsitas Diponegoro. Semarang.
- Yosa. 2010. Pengawasan Keuangan. Diunduh dari www.irjen-depdagri.go.id.
- Zuliarti. (2012). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Kudus.